

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai analisis *agile leadership* dalam pelayanan pembuatan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat (Disdukcapil KBB) ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah yang berkaitan tentang “Apakah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat sudah memenuhi karakteristik *Agile Leadership* melalui program My Darling?”. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Kepala Disdukcapil KBB dalam membuat program inovasi pelayanan pembuatan e-KTP kendaraan keliling (My Darling) yang mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan pembuatan e-KTP di Disdukcapil KBB, membuktikan bahwa Kepala Disdukcapil KBB dapat dikatakan telah menerapkan gaya kepemimpinan yang *agile* dalam memimpin organisasinya. Hal ini dapat dilihat dari Kepala Disdukcapil yang telah memenuhi kesepuluh karakteristik yang terdapat pada teori *Agile Leadership*.

Dalam memimpin organisasinya, Kepala Disdukcapil KBB selalu melibatkan bawahannya dalam mengambil sebuah keputusan dan memberikan ruang gerak bagi para bawahannya untuk mengemukakan pendapatnya. Kepala Disdukcapil KBB terbuka terhadap ide dan informasi yang berasal dari semua pihak baik pihak internal maupun pihak eksternal organisasi, sehingga keterbukaan terhadap ide dan informasi tersebut yang menjadikan Kepala Disdukcapil mampu

menyesuaikan diri apabila dihadapkan oleh sebuah tantangan berupa kendala atau hambatan yang muncul pada saat program My Darling dijalankan. Untuk mengatasinya Kepala Disdukcapil memilih solusi terbaik yang dianggap paling efektif dan efisien. Selain itu, dalam melakukan sebuah pekerjaan Kepala Disdukcapil selalu membuat target batas kerja, agar pekerjaannya dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Meskipun sudah dapat dikatakan bahwa Kepala Disdukcapil KBB telah menerapkan gaya kepemimpinan yang *agile* dalam memimpin organisasinya, namun masih ditemukan tantangan bahwa beliau belum mampu mengidentifikasi dan mengubah keterbatasan sumber daya menjadi peluang untuk berinovasi. Tantangan tersebut berkaitan dengan karakteristik keempat dalam agile leadership yaitu kemampuan mengidentifikasi peluang.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan dari beberapa informasi dan wawancara, diantaranya sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Dinas harus memiliki perhatian pada upaya pemetaan peluang untuk berinovasi yang berasal dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki
2. Pemimpin dan pegawai Disdukcapil perlu memiliki pemahaman bahwa keterbatasan sumber daya bukan menjadi penghalang untuk berinovasi. Upaya ini dapat dilakukan melalui sebuah pelatihan atau dengan memberikan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Corsellis. *Public Service Interpreting: The First Step*. United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2009.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*. Jogjakarta: Teras, 2011.
- Edward Morrison, dkk. *Strategic Doing (Ten Skills for Agile Leadership)*. Canada: Wiley, 2019.
- Fulthoni, dkk. *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan (Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama)*. Jakarta: ILRC, 2009.
- H. B. Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS, 2006.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akba. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Ibrahim M. A. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pontianak, 2015.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)* Jakarta: GP.Press, 2009)
- James L. P. dan Hondeghem, A. *Motivation in Public Management: The Call of the Public Service*. Australia: Wiley Online Library, 2010.
- John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. SAGE publication, 2013.
- Koning Peter. *Agile Leadership Toolkit*. UK: Pearson Education, 2019.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2014.

Taufiqurokhman dan Satipsi, *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. Tangerang: UMJ Press, 2018.

Sumber Media Internet:

Agus Chandra. *Patologi Birokrasi dan Agenda Strategi: Kolaborasi Pendekatan New Public Management dan New Public Service Melalui Model Citizen's*.
Volume 2 No. 1
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/1344/693>

Edward Febriyatri. *Aneka Alasan Warga Enggan Buat e-KTP: Malas Antre Hingga Proses yang ribet*. <https://news.detik.com/berita/d-3284885/aneka-alasan-warga-enggan-buat-e-ktp-malas-antre-hingga-proses-yang-ribet>.

Ibnu Nugroho, 2013. *Perbedaan KTP Lama, KTP Nasional dan KTP Elektronik (e-KTP)*. <http://disdukcapil.bontangkota.go.id/index.php/ktpel/150-perbedaan-ktp-lama-ktp-nasional-dan-ktp-elektronik-e-ktp>.

LAPOR. “e-KTP”. Tersedia di <https://www.lapor.go.id/search?q=ektp&page=3>.

Nugroho Saputro, *Peran Kepemimpinan Visioner dalam Pelayanan Publik*. <http://diklat.semarangkota.go.id/post/peran-kepemimpinan-visioner-dalam-pelayanan-publik-dr-ir-nugroho-saputro-mm>.

Viky Aldin, dkk. *Menggagas Revolusi Mental Birokrasi melalui Konsep Competitive Agile Leadership*. Volume 2 No. 1
<https://www.semanticscholar.org/paper/Menggagas-Revolusi-Mental-Birokrasi-Melalui-Konsep-Hulu-Patuninno/1d7312730e06c9025f42168c75b330895d94d4ca#paper-header>.

Perundang-Undangan:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.